



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI

Nyoman Ayu Sukma Pramestisari

Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia

*allgtr.asp@gmail.com

How to Cite: Pramestisari, N. A. S. (2022). Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2 (1): 47-64. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.47-64>

Abstract

The process of industrialization is often accepted as a perfect solution to alleviating the socio-economic problems of a region. Bali through the development of industry and tourism has succeeded in boosting the regional and national economy since its early development in 1980. But on the other hand, industrial dynamics also reflect the existence of production and reproduction of risk for the community such as the privatization of public space, desacralization, marginalization and exploitation of natural and human resources Starting from this problem, this research seeks to dissect how the Balinese people respond to the tourism industry climate through a movement platform. The ForBALI social movement as an effort to thwart the Benoa Bay reclamation program is a tangible manifestation that the Bali tourism industry is felt to have negative impact on the community. ForBALI resistance is a manifestation of the community's counter hegemony to the oligarchs who try to continue to make efforts to perpetuate power under the pretext of economic growth and absorb labor. Interestingly, a counter discourse emerged from the pro-reclamation community of Benoa Bay departing from the view that development and being able to solve various social problems. The existence of these two groups for and against reclamation indicates that there is a dialectical process related to contestation in an effort to hegemony carried out by both parties.

Keywords: Tourism Industry; Social Movement; Counter Hegemony

Abstrak

Proses industrialisasi kerap kali diamini sebagai solusi jitu mengentaskan permasalahan sosial ekonomi suatu daerah. Bali melalui pengembangan industri pariwisata berhasil mendongkrak perekonomian daerah dan nasional sejak pengembangan awal di tahun 1980. Tetapi di lain sisi, dinamika industri pariwisata justru merefleksikan eksistensi produksi dan reproduksi risiko bagi masyarakat seperti privatisasi ruang publik, desakralisasi, marjinalisasi dan eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Bertolak dari persoalan tersebut penelitian ini berupaya untuk membedah bagaimana masyarakat Bali merespon iklim industri pariwisata melalui wadah gerakan. Gerakan sosial ForBALI sebagai upaya menggagalkan program reklamasi Teluk Benoa merupakan wujud konkret bahwa industri pariwisata Bali dirasa memiliki dampak negatif bagi

masyarakat. Resistensi ForBALI merupakan wujud dari counter hegemony masyarakat kepada oligarki yang mencoba untuk terus melakukan upaya melanggengkan kekuasaan dengan dalih pertumbuhan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Menariknya, muncul wacana tandingan dari masyarakat pro reklamasi Teluk Benoa berangkat dari pandangan bahwa pengembangan pariwisata justru mampu menyelesaikan beragam problema sosial. Eksistensi dua kelompok pro dan kontra reklamasi ini sesungguhnya menandakan bahwa terdapat sebuah proses dialektis terkait kontestasi dalam upaya menghegemoni yang dilakukan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Industri Pariwisata; Gerakan Sosial; Kontra Hegemoni

I. PENDAHULUAN

Menyoal industri ataupun industrialisasi suatu negara identik dengan implementasi pembangunan. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada definisi tunggal atas industri, namun secara umum dapat dipahami bahwa industri merupakan proses komodifikasi oleh perusahaan sehingga menghasilkan barang yang sifatnya mengganti bahan dasar dan menaikkan nilai atas barang tersebut. Sedangkan, industrialisasi merujuk pada bagaimana proses produksi melalui sumber daya non hayati guna menghasilkan barang dan jasa serta melibatkan mekanisasi. Dalam konteks ini, baik industri maupun industrialisasi memiliki spirit sekaligus esensi serupa sebagai kegiatan ekonomi dengan memaksimalkan nilai tambah atas hasil produksinya (Pasaribu, 2012). Maka dari itu, wacana industri seringkali merujuk pada pabrik manufaktur dan penggunaan mesin dalam rangka mencapai maksimalisasi akumulasi profit demi kepentingan lebih besar terkait pendapatan perekonomian suatu negara.

Konsep industri sebagai sebuah konstruksi merupakan produk wacana negara maju yang dalam perkembangannya justru menjadi tolak ukur bagi suatu negara

untuk dikatakan maju. Nampak menjanjikan memang ketika bagaimana kehidupan di negara maju yang mengimplementasikan pembangunan sektor industri sejalan dengan gambaran kesejahteraan masyarakatnya, kekuatan persaingan ekonomi politik global serta perekonomian negara yang stabil (Hadirman, 2017). Bahkan, dalam konteks modernisasi, industrialisasi sebagai wajah dari pembangunan diilhami sebagai sebuah jalan mujarab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka tidak mengherankan jika mayoritas negara berkembang di dunia berlomba menggencarkan pembangunan dan mengejar ketertinggalan melalui pengembangan sektor industrinya.

Mengantongi label sebagai negara berkembang, Indonesia di rezim orde baru menjadi titik tolak dalam merubah paradigma pembangunan menuju pasar bebas. Pembangunan dengan penekanan prinsip industri masuk menjadi agenda politik sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan perekonomian negara. Maka dari itu, disamping membuka pintu untuk para pemodal berinvestasi, sejalan dengan itu maka berkembanglah

berbagai jenis industri manufaktur maupun ekstraktif. Menjadi menarik ketika memahami industri melampaui kerangka industri umum sebagai kumpulan bangunan berwujud pabrik dan menggunakan mesin sebagai alat produksi. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai ranah yang juga mengadopsi logika industri sehingga muncul industri dalam dimensi pariwisata, musik, budaya, film dan lain sebagainya. Kondisi ini menunjukkan logika industrial bersifat adaptif disegala aspek.

Secara kontekstual, pengembangan berbagai sektor industri terjadi di Indonesia, termasuk industri pariwisata yang menjadi bagian penting dalam agenda politik utamanya paska penetapan UU Kepariwisataan No. 9 Tahun 1990 sebagai bagian dari pembangunan nasional dengan mengedepankan kearifan lokal, kini diperbaharui dalam UU No. 10 Tahun 2009. UU Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009. Dengan pondasi mengkombinasikan teknologi dan ilmu pengetahuan atau intelektualitas termasuk spesialisasi pembagian kerja dalam proses produksinya, industri pariwisata berkembang pesat di beberapa daerah potensial Indonesia. Melihat histori perkembangan sektor industri pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu primadona dalam meningkatkan laju pembangunan nasional. Sektor pariwisata terbukti mampu menopang perekonomian dan dikatakan merupakan salah satu sektor terpenting untuk mendongkrak devisa serta peningkatan penerimaan pendapatan pemerintah di luar sektor migas. Produk dari industri

pariwisata dapat dilihat dengan adanya berbagai perusahaan yang menawarkan jasa seperti hotel, angkutan, hiburan, penyelenggaraan tour dan lain sebagainya. Di lain sisi, secara alamiah komodifikasi atas alam juga menjadi produk dalam industri pariwisata seperti pemandangan pantai, lautan, sungai, gunung dan sebagainya. Adapun masyarakat lokal menunjang kelangsungan industri pariwisata dengan identitas “keramahtamahan”.

Berbicara mengenai industri pariwisata Indonesia, tidak dapat terlepas dari Provinsi Bali. Trajektori industri pariwisata Bali menjadi kunci dalam melihat secara holistik iklim pariwisata Bali hari ini. Ketika perkembangan industri pariwisata Bali menjadi poros utama bagi daerah guna meningkatkan pendapatan perekonomian, secara signifikan akhirnya mempengaruhi tatanan sosial kehidupan masyarakat utamanya akibat spirit komodifikasi dalam konsep industri. Tahun 1980-an menjadi titik tolak untuk melihat gencarnya pembangunan seperti infrastruktur dan akomodasi sebagai penunjang industri pariwisata. Bali Selatan merupakan daerah vital pengembangan pariwisata era 80an yang meliputi sebagian besar Kabupaten Badung seperti Kuta, Nusa Dua, Canggu, Seminyak, Legian dan lain sebagainya (Pramestisari, 2019). Pembangunan di daerah tersebut meliputi akomodasi penunjang pariwisata seperti hotel, vila, resort, restoran, pusat perbelanjaan, biro jasa wisata hingga wisata buatan. Kondisi terkait sejalan dengan pemahaman industri pariwisata merupakan

serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan lainnya namun saling bersinergi. Bahkan wacana masyarakat Bali adalah masyarakat yang ramah terhadap turis serta masyarakat Bali adalah masyarakat yang ajeg dengan tradisi terus digemborkan demi menarik perhatian para turis sekaligus melariskan pariwisata Bali.

Ironisnya, pengembangan industri pariwisata Bali tidak selalu menghasilkan perubahan sosial ekonomi secantik iklan pariwisata itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, industri pariwisata telah membantu masyarakat setempat dalam mendongkrak perekonomian, tetapi dilain sisi perlu mendapat perhatian bahwa industri pariwisata juga membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa ilmuwan dan pengamat sosial melalui segenap kajian melontarkan adanya implikasi negatif dari pengembangan industri pariwisata Bali. Dominasi logika pasar menjadi penanggungjawab utama atas kondisi ini. Jika dahulu turis datang karena kebudayaan Bali, kini Bali harus memiliki budaya sesuai keinginan pasar (Suryadana, 2013). Kemacetan, banjir, privatisasi ruang publik, pembebasan lahan, pergeseran nilai kesakralan atas budaya hingga munculnya masyarakat marjinal menjadi contoh atas desakan iklim industri pariwisata. Faktor utama dari implikasi negatif tentu saja dominasi atas pelaku industri yang diisi oleh para pemodal yang hanya mengutamakan akumulasi kapital. Dapat dibayangkan betapa rendahnya daya tawar masyarakat di atas wilayah mereka sendiri karena kuasa para elit dalam

memonopoli alur pembangunan.

Penolakan reklamasi Teluk Bena menjadi satu wujud konkret bagaimana masyarakat berusaha mengintervensi alur pembangunan dari para oligarki. Jika melihat kondisi pariwisata Bali dewasa ini terdapat sebuah gejala signifikan terkait wacana Reklamasi Teluk Bena. Wacana reklamasi telah beredar sejak tahun 2012. Kondisi ini bertolak dari kepadatan pariwisata Bali Selatan baik dari segi lahan serta turis yang menumpuk. Maka dari itu, reklamasi Teluk Bena dicanangkan untuk mengurai kepadatan pariwisata Bali Selatan dengan membangun destinasi baru. Selain itu, jika terealisasi reklamasi Teluk Bena sebagai upaya pengembangan industri pariwisata dirasa tepat karena tidak akan mengambil lahan masyarakat di daratan Bali melainkan pemanfaatan kawasan dengan cara revitalisasi (Anggara, 2017). Logika ini secara mendasar dapat saja dikatakan sebagai alternatif solusi bagi pemerintah dalam merespon berbagai kajian dan kritikan terkait permasalahan lahan masyarakat yang menipis akibat pengembangan pariwisata.

Dimulai sejak tahun 2012, resistensi masyarakat yang tergabung dalam aliansi ForBALI mengupayakan pembatalan reklamasi Teluk Bena secara persuasif hingga represif. Pada tahun 2019 saja telah dilakukan sekitar empat kali aksi demonstrasi dalam merespon perkembangan reklamasi. Masyarakat yang tergabung dalam gerakan sosial ini berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, seniman, masyarakat adat dan grup musik

dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi menarik dan paradoksal ketika melihat secara geografis rencana pemerintah sesungguhnya telah merespon kekhawatiran terkait pengembangan pariwisata tidak dilakukan di daratan Bali namun tetap mendapatkan resistensi masif.

Resistensi dari masyarakat atas pembangunan reklamasi Teluk Benoa secara tidak langsung menunjukkan 21 tahun paska reformasi, isu pembangunan berkeadilan masih menjadi persoalan di Indonesia. Respons negatif masyarakat akhirnya menjadi bertolak belakang dengan spirit 1998 yang merujuk pada pembangunan berkeadilan dengan meletakkan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat sebagai harga mati. Amanah kebijakan UU Kepariwisata pada saat bersamaan dapat dimaknai mengalami kepincangan dalam implementasinya. Kepincangan terefleksikan ketika UU Kepariwisata telah memandatkan bahwa kearifan lokal harus dikedepankan tetapi masyarakat merasa justru industrialisasi merusak tatanan lokal.

Beberapa kajian kritis secara konkret menegaskan bahwa gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa merefleksikan perlawanan masyarakat terhadap alur kebijakan pemerintah. (Rainy, *et al*, 2018) melalui kajiannya berjudul Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali menekankan bahwa penolakan masyarakat dapat dilihat dari ultiaspek termasuk budaya. Dimensi penolakan pada aspek

budaya berangkat dari trajektoris pengembangan pembangunan industri pariwisata yang secara ironis menggerus budaya lokal. Penggerusan ini dikarenakan pariwisata menjadikan perubahan pada kebudayaan yang bersandar pada nalar, logika, untung rugi dan rasa pro-rakyat yang semu. Pada satu sisi pariwisata harus diakui mampu mendongkrak pendapatan daerah, tetapi di sisi lain pariwisata berakibat pada pemudaran budaya lokal seperti biasanya sekat antara tabu dan tidak tabu, sakral dan tidak sakral. Dengan kata lain, pariwisata mengakibatkan budaya terkomersialisasi. Bahkan ironisnya sesuai komersialisasi budaya berdasarkan keinginan wisatawan, tidak lagi bertolak dari aspek lokalitas seperti kesakralan. Misalnya, Tari Kecak kini ditampilkan kapanpun ada permintaan turis, sedangkan dahulu hanya ditampilkan pada momen-momen tertentu saja. Contoh lainnya tercermin dari maraknya privatisasi terhadap ruang publik pada pembangunan akomodasi pariwisata. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses ruang publik yang tidak jarang dahulunya berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan adat istiadat.

Penelitian dari (Galuh, 2016) turut menganalisis gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa sebagai sebuah gerakan sosial baru. Hal ini dikarenakan gerakan penolakan berangkat dari isu kemanusiaan kontemporer dengan fokus permasalahan lingkungan, bukan isu kelas seperti gerakan sosial lama. Melalui media sosial, ForBALI (komunitas masyarakat penolak reklamasi) menyalurkan aspirasi dengan praktik

penyebaran konten sebagai proses pen definisian identitas diri mereka sendiri, siapa lawan dan siapa kawan. Di lain sisi ForBALI juga melakukan strategi refleksi yaitu pembentukan opini publik melalui ikatan lemah aktor. Hasilnya opini berhasil beredar dengan cepat dan luas. Bertolak dari perjuangan ForBALI dengan pemanfaatan media sosial menunjukkan bahwa media sosial hari ini tidak netral, memang revolusioner tetapi tidak utopis. Meskipun demikian, eksistensi media sosial sebagai media baru tidak bisa menggantikan media perjuangan konvensional begitu saja. Maka dari itu, ForBALI mengkombinasikan keduanya demi tercapainya tujuan secara maksimal. Seperti dapat dilihat yaitu aksi demo, diskusi publik dan sebagainya yang melibatkan cara-cara konvensional.

Berbagai kajian telah menganalisis penolakan reklamasi Teluk Benoa dari berbagai aspek baik sosial, budaya, media dan politik. Serupa dengan kajian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk membongkar kontroversi pembangunan reklamasi Teluk Benoa namun melalui dimensi pembangunan khususnya kerangka proses industrialisasi yang menghegemoni dan melahirkan risiko-risiko bagi masyarakat. Kompleksitas permasalahan berwujud paradoks antara bagaimana pemerintah menganggap telah merespon dan mengupayakan minimalisasi implikasi negatif pengembangan industri pariwisata melalui reklamasi Teluk Benoa dengan dalil meningkatkan pendapatan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat justru mendapat resistensi radikal oleh

masyarakat yang terkonsolidasi dalam bentuk gerakan sosial yang begitu terlembaga. Bertolak dari paradoks tersebut, tulisan ini ditujukan untuk membedah secara lebih tajam dan kritis terkait permasalahan penolakan reklamasi Teluk Benoa melalui dua rumusan masalah (1) Mengapa ForBALI muncul sebagai gerakan sosial?; (2) Bagaimana relevansi gerakan sosial ForBALI dalam konteks industri pariwisata Bali?. Guna mempertajam analisis terhadap perolehan data akan menggunakan berbagai perspektif sosial khususnya Teori Gramsci terkait hegemoni termasuk konsep kontra hegemoni serta perspektif Ulrich Beck mengenai masyarakat risiko.

Pemilihan kedua teori dalam tulisan ini, ditentukan dengan memperhatikan tujuan dari tulisan yang tercermin dari rumusan masalah. Membedah permasalahan industri pariwisata melalui gerakan sosial ForBALI akan menjadi fokus bahasan. Dengan kata lain, tulisan ini akan membaca permasalahan industri pariwisata melalui kondisi relasi kuasa dalam tataran konsep dan praksis.

Gramsci dalam Teori Hegemoni berusaha untuk membedah bagaimana produksi dan reproduksi kuasa terus terjadi. Hegemoni dalam pengertian ini berupa pemaksaan sebagai suatu persetujuan dengan tujuan mempertahankan kekuasaan. Berbeda pandangan dengan Marx, Gramsci memandang kelas tidak selalu disebabkan oleh ekonomi deterministik. Ditegaskan pula bahwa hegemoni sebagai suatu upaya

melanggengkan kekuasaan dapat dipahami dari aspek kognitif. Ideologi memiliki peran penting dalam konteks ini karena pemikiran kelas yang berkuasa diendapkan pada kesadaran kelas subordinan sebagai sebuah konsensus mengenai permasalahan sosial sehingga mempengaruhi pola pemikiran dan seringkali menggunakan perangkat birokrasi (Salamini, 1981). Dengan kata lain, produksi kebenaran melalui kontrol pikiran menjadi penting sebagai instrumen pelanggeng kekuasaan. Di lain pihak, Gramsci meyakini bahwa peran kunci kelas subordinan dalam melakukan counter-hegemony akan efektif untuk melawan ideologi yang ditanamkan oleh para kapitalis. Eksistensi rasa optimis ini hadir sebab hegemoni tidak bersifat mapan dan diperlukan perjuangan terus menerus untuk mempertahankan maka berbagai bentuk perlawanan atas ketimpangan dapat dilakukan untuk menggoyahkan hegemoni suatu sistem.

Selanjutnya, Teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck akan digunakan untuk melihat bagaimana industri pariwisata yang dikembangkan melalui kerangka hegemoni berdampak terhadap masyarakat. Hal ini menjadi relevan mengingat pondasi pemikiran Beck ialah masyarakat industri masa modernisasi lanjut yang harus menghadapi ancaman dan ketidakpastian hidup akibat bagaimana para kapitalis memproduksi risiko sejalan dengan kegiatan spirit utama mereka yaitu akumulasi kapital. Risiko dalam tataran ini dipahami sebagai dampak dari pertumbuhan industrialisasi dan seringkali bersifat tidak terduga dan terjadi secara

massif. Selanjutnya, anggapan paradigma industrialisasi mengenai perubahan dan masa depan sebagai suatu yang berharga berdampak pada tercerabutnya nilai-nilai tradisional dari masyarakat serta melahirkan watak eksploitatif yang berlawanan dengan kearifan tradisi. Meskipun di era modernitas tahap lanjut Beck menyatakan bahwa risiko dapat menyerang kelas sosial apapun, tetapi distribusi risiko terhadap kelas sosial atas lebih mampu termanajemen akibat pemanfaatan segala modal yang mereka miliki sehingga seolah mampu membeli "keselamatan". Pada tahap ini Beck menyatakan dalam menghadapi perubahan dan risiko yang tidak terduga, masyarakat dituntut untuk refleksif. Dengan kata lain, kehadiran berbagai risiko tidak terduga sebagai dampak dari industrialisasi harus dihadapi dengan pengambilan keputusan yang cepat karena mereka tidak memiliki cukup waktu untung berpikir dan bernegosiasi dengan himpitan situasi (Beck, 2012).

II. METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. (Creswell, 2007) menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah metode yang mampu mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu maupun kelompok berdasarkan permasalahan sosial. melalui kualitatif, penelitian ini dapat memenuhi kebutuhan atas pemahaman mendetail, lengkap serta komprehensif terhadap permasalahan dengan perolehan data bersifat variatif dan berlimpah.

Pendekatan kualitatif menjadi tepat pula mengingat kasus penolakan atas pembangunan reklamasi Teluk Benoa bersifat kontemporer atau dengan kata lain sedang berlangsung.

Dilain sisi penelitian ini menggunakan sumber utama data yaitu data sekunder. Data sekunder meliputi seluruh literatur atau kajian terdahulu, arsip maupun dokumentasi yang berkaitan dan telah ada sebelumnya. Literatur yang digunakan berupa data dari web resmi ForBALI, jurnal, buku dan kajian terdahulu mengenai industrialisasi, pembangunan dan gerakan sosial.

Paska pengumpulan data dilakukan, tahap selanjutnya ialah menganalisis data. Data pada tulisan ini dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi meliputi penyeleksian data dengan cara dipilih, disederhanakan maupun diabstrakkan sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan. Cara ini ditempuh untuk memisahkan data yang dianggap tidak relevan.

Selanjutnya data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan melibatkan kemampuan penulis dalam memahami makna dan alur sebab akibat berdasarkan rumusan masalah. Agar hasil analisis akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis melakukan verifikasi dengan mempertanyakan kembali maupun melihat perolehan data kembali.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

ForBALI: Sebuah Upaya Gerakan Sosial Menyelamatkan Kawasan Konservasi

Dalam upaya membaca industri pariwisata melalui gerakan sosial ForBALI, menjadi penting untuk memaparkan secara singkat trajektori gerakan guna memahami pemantik kemunculan aliansi masyarakat yang massif dalam menolak pembangunan reklamasi Teluk Benoa. Maka dari itu, pemaparan mengenai dimensi kontekstual sejarah aliansi masyarakat dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa termasuk bagaimana relevansi pergerakan mereka hingga hari ini akan disajikan.

Gerakan sosial ForBALI muncul pada tahun 2012 bertepatan dengan wacana Teluk Benoa akan direklamasi. Elemen masyarakat yang terlibat berasal dari kalangan seniman, aktivis, akademisi, LSM hingga masyarakat sipil. Pengembangan wacana kritis hingga aksi demo atas bagaimana proses rencana reklamasi Teluk Benoa bukan sebuah pembangunan pro rakyat terus digencarkan. Hal ini pada mulanya berawal dari perubahan status konservasi Teluk Benoa melalui Perpres 51 Tahun 2014 dengan mengubah status konservasi menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Paska penerbitan Perpres, PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) mengantongi izin lokasi reklamasi dari menteri kelautan dan perikanan seluas 700 Hektar. Dilain sisi, masyarakat merasakan hal mengganjal mengenai produksi wacana pemerintah bahwasannya reklamasi dilakukan karena

terjadi sedimentasi. Hal tersebut tentu kontradiktif mengingat jika terjadi sedimentasi seharusnya dilakukan upaya pengerukan terhadap wilayah konservasi, namun yang dilakukan justru sebaliknya.

Di samping tindakan kontradiktif melalui regulasi, Universitas Udayana Denpasar dalam konferensi pers menyatakan bahwa hasil dari studi kelayakan rencana reklamasi Teluk Benoa dinyatakan tidak layak baik dari aspek teknis, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi finansial (ForBALI, 2013). Meskipun hasil studi kelayakan telah terbit, proyek reklamasi tetap berjalan. Berbagai paradoks mengakibatkan masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka tidak terakomodasi dengan baik. Pasalnya, sedari awal masyarakat merasa upaya negosiasi melalui komunikasi terkait rencana reklamasi tidak mendapat respon memadai. Bahkan terdapat indikasi dalam proses perencanaan dan pengembangan hanya melibatkan aliansi pro reklamasi. Maka dari itu, turun ke jalan dengan mempersatukan seluruh elemen masyarakat menjadi senjata pamungkas ketika upaya persuasif tidak mampu ditempuh.

Upaya persuasif dalam beberapa kesempatan pernah ditempuh dengan menghadirkan perwakilan dari pihak pemerintah, investor dan aliansi masyarakat kontra reklamasi. Misalnya dalam upaya negosiasi pembatalan reklamasi di Kantor Gubernur Provinsi Bali, terjadi negosiasi panjang antara kedua belah pihak baik menolak maupun menyetujui upaya ini. Meskipun gagasan dari masing-masing

pihak telah disampaikan, namun terjadi *deadlock* atau tidak adanya jalan keluar yang disepakati bersama. Indikasi masyarakat bahwa proyek ini lebih besar mengakomodasi kepentingan investor semakin kuat ketika masyarakat kontra duduk berseberangan dengan pemerintah, investor dan aparat keamanan yang duduk bersama sebagai oposisi. Maka dari itu, pilihan menyuarakan aspirasi melalui aksi dipilih untuk melakukan maksimalisasi upaya dengan mengerahkan masyarakat yang memiliki keresahan serupa.

Dalam setiap kesempatan, pemerintah dan investor akan menyatakan bahwa urgensi reklamasi merupakan wujud nyata untuk mengembangkan industri pariwisata Bali termasuk demi kepentingan masyarakat Bali. Apabila reklamasi terealisasi maka akan terjadi proses industrialisasi termasuk ketersediaan lapangan kerja, menyerap pengangguran dalam jumlah besar dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pusat akibat devisa (Wardana, 2017). Di lain sisi, perwakilan aliansi masyarakat penolak reklamasi tetap beranggapan bahwa terealisasinya reklamasi hanya akan membawa dampak buruk lebih besar seperti hilangnya fungsi konservasi, rentan akan bencana alam dan banjir, terumbu karang rusak, abrasi dan pembangunan tak berimbang. Keteguhan kedua belah pihak dengan paradigma masing-masing inilah yang mengakibatkan ketegangan sosial tanpa henti. Dalam tahun 2019 saja, setidaknya ForBALI telah melakukan empat kali aksi menuntut ketegasan pemerintah dalam membatalkan rencana reklamasi.

Menghadapi keteguhan pemerintah yang sejalan dengan investor untuk melakukan reklamasi dianggap sebagai *abuse of power* terutama melalui penerbitan berbagai kebijakan tanpa melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat kontra reklamasi melalui berbagai kajian berpandangan justru masyarakat akan menanggung risiko lebih besar bila proyek reklamasi terus dilangsungkan, misalnya rawan banjir, rentan bencana, terumbu karang rusak, mengancam ekosistem mangrove, abrasi pantai, bencana ekologi meluas, tanah murah untuk investor, kebijakan pro investor, pembangunan tidak berimbang dan marginalisasi masyarakat (forbali.org). Bahkan ketika pemerintah menyatakan bahwa reklamasi dilakukan akibat penuhnya Bali Selatan sebagai sumbu pariwisata Bali sehingga untuk menghindari pengembangan berbasis alih fungsi daratan Bali, dirasa hanya sebatas dalih pembenar semata. Kegeraman masyarakat diperparah dengan lemahnya transparansi dan partisipasi masyarakat dari awal mula perencanaan hingga eksekusi reklamasi yang dalam jangka panjang justru merugikan masyarakat Bali. Ditambah lagi, terdapat fakta bahwa ruas lahan telah terjual bahkan sebelum reklamasi dilaksanakan.

Trajektori muasal gerakan sosial ForBALI dalam paradigma di atas memperkuat indikasi elitisme pada kasus upaya reklamasi Teluk Benoa. Elitisme dalam konteks ini meliputi bagaimana terjadi pelemahan dalam suatu sistem pemerintahan ketika arah pembangunan negara melalui industrialisasi dikuasai oleh

oligarki (Manalu, 2007). Kondisi ini direfleksikan melalui berbagai penerbitan kebijakan terkait proyek reklamasi yang sama sekali berbanding terbalik dengan kepentingan masyarakat. Tendensi peran vital sistem pasar neo liberalisme semakin kuat dalam reklamasi Teluk Benoa mengingat proyek ini di bawah agenda politik nasional terutama proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menargetkan pendapatan perkapita negara sejumlah US\$ 16.000 pada tahun 2025.

Di samping berbekal agenda nasional, pembenaran atas proyek reklamasi bertolak dari UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan 33 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 1 (23) menyebutkan bahwa:

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.”

Pemerintah, para investor dan masyarakat pro reklamasi berpegangan kuat pada pemahaman bahwa reklamasi memberikan kelebihan atau keuntungan dalam menyediakan lahan sebagai berbagai sarana keperluan seperti lahan baru untuk perumahan, pengembangan pariwisata dan sebagainya. Untuk mengurangi dampak buruk dari reklamasi pemerintah dan seluruh stakeholder pro reklamasi

memberikan jaminan bahwa telah dilakukan studi kelayakan dengan hasil Teluk Benoa layak direklamasi.

Pada tahun 2014, publik digegerkan dengan wacana tandingan ForBALI, yaitu terdapat desakan untuk menyegerakan reklamasi melalui aliansi masyarakat ForsBALI dengan produksi wacana dukung revitalisasi. Perjuangan aliansi masyarakat ini serupa dengan ForsBALI seperti aksi hingga pemasangan baligho. Pandangan mereka bahwa proyek reklamasi akan mampu menurunkan angka pengangguran, memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat Bali dan menyelamatkan wilayah konservasi (Sukiswanti, 2014). Mereka juga menganggap bahwa gerakan ForBALI hanya menghambat perkembangan industri pariwisata yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan ditengah himpitan permasalahan hidup masyarakat. Meskipun begitu, revitalisasi tetap dianggap sebagai kedok oleh ForBALI karena untuk menyelamatkan wilayah konservasi seharusnya dengan pengerukan bukan pengurugan.

Merespon resistensi ForBALI, ForsBALI melemparkan segenap kajian bahwa proyek reklamasi akan menjadi sebuah proyek yang ramah lingkungan dan ramah sosial budaya. Hal ini dikarenakan selama proyek berlangsung akan dilengkapi dengan pemasangan silk protector untuk membatasi area pembangunan dan jalur nelayan guna menjaga kebersihan air dan tumbuhan laut. Seluruh argumen ini disebarakan melalui berbagai media baik cetak online hingga aksi demonstrasi. Aksi

April 2015 menjadi salah satu aksi besar massa dalam mendesak pemerintah DPRD Bali dan Gubernur untuk segera melakukan proyek revitalisasi dengan tujuh alasan. Alasan tersebut diantaranya mencegah banjir, menambah ruang hijau, meningkatkan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi, memulihkan wilayah konservasi Pulau Pudut, melindungi mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Winarno, 2015).

Fragmentasi respons pembangunan reklamasi Teluk Benoa menunjukkan adanya kontestasi kepentingan. Pemerintah memiliki kepentingan secara formal untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penciptaan destinasi wisata baru serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena dalam pembangunan pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, maka dibutuhkan suntikan dana dari pada investor. Dimana, pada konteks ini kepentingan para investor jelas yaitu untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin. Di lain sisi, pemerintah dan para investor mengaku akan mengutamakan Green Development yaitu memperhatikan lingkungan dalam pembangunan dan sebagai mitigasi dari bencana. Masyarakat pro reklamasi disamping meyakini wacana dari pemerintah dan investor juga menggarisbawahi bahwa reklamasi akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Meskipun demikian, perlawanan dari masyarakat kontra reklamasi bukan tanpa alasan. Perlawanan hadir karena rasa traumatik atas iklim pariwisata yang merongrong masyarakat Bali sedikit demi sedikit (Galuh, 2016). Privatisasi ruang

publik, pembebasan lahan, pergeseran nilai kesakralan atas budaya, munculnya masyarakat marjinal hingga kepadatan menjadi tolak ukur untuk menolak reklamasi. Pasalnya, sejak awal masyarakat merasa reklamasi adalah proyek kontroversial yang penuh kerahasiaan. Rasa traumatik ditambah adanya kekerasan terhadap aktivis pegiat demo tolak reklamasi Teluk Benoa yang digadag-gadang berasal dari kaki tangan para elite korporat. Perbedaan kepentingan inilah yang secara terus menerus berkontestasi mewarnai sektor pariwisata Bali selama kurang lebih 12 tahun.

Hegemoni dan Counter Hegemony: Proses Tanpa Akhir

Dinamika gejolak sosial antara pihak pro reklamasi dan kontra reklamasi sesungguhnya menunjukkan sebuah perjuangan untuk memenangkan kuasa atas arah pembangunan. Dalam konteks reklamasi Teluk Benoa pondasi atas ketegangan secara gamblang terlihat bahwa sumbu permasalahan ialah implementasi pengembangan industri pariwisata di kawasan Teluk Benoa. Bertolak dari paparan realita di atas maka Teori Hegemoni Gramsci menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan bagaimana upaya pemerintah dan investor ditahap awal melakukan produksi wacana serta penerbitan berbagai regulasi demi menunjang pembangunan reklamasi. Penerbitan Perpres No. 51 Tahun 2014 dengan menghapuskan pasal-pasal konservasi serta pemberian ijin kepada PT. TWBI melalui 445/MEN-KP/VIII/2014 dari

Menteri Kelautan dan Perikanan di tengah gejolak sosial dan pergerakan masyarakat menjadi bentuk konkret upaya hegemoni pemerintah. Menjadikan regulasi dan kekuasaan sebagai sebuah instrumen semakin menguat tatkala penerbitan dua regulasi kunci itu secara bersamaan meskipun terdapat berbagai kajian empiris tandingan.

Meskipun dapat dikatakan bahwa regulasi sebagai produk dari upaya hegemoni pemerintah dan korporat dalam melakukan reklamasi, tetapi bersamaan dengan itu juga terjadi proses produksi dan reproduksi wacana. Produksi wacana dengan sisipan ideologi sebagai aspek kognitif dalam melakukan hegemoni secara konkret sesungguhnya terletak pada bagaimana reklamasi Teluk Benoa diwacanakan sebagai “dewi penyelamat” atas permasalahan sosial ekonomi masyarakat Bali. Misalnya, membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja khususnya pemuda Bali serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan devisa negara. Pada batas tertentu, alasan tersebut menjadi relevan untuk menjawab beberapa permasalahan sosial, namun ketika masyarakat justru tidak dilibatkan serta proses negosiasi tidak mampu mengakomodasi suara masyarakat, menjadi wajar jika muncul indikasi bahwa proyek ini memangku kepentingan besar bagi sekelompok elite.

Memahami kasus ForBALI dalam kaca mata industri sebagai sebuah konstruksi serta melihat dinamika lapangan, akhirnya pemikiran bermuara pada reklamasi Teluk

Benoa hanya sebuah momentum bagi masyarakat dalam mengkritik iklim pariwisata di Bali. Hal ini terlihat dari bagaimana aliansi masyarakat ForBALI seringkali menggaungkan suara dengan bangunan wacana pengembangan pariwisata berkedok revitalisasi hanya mengakomodasi kepentingan oligarki. Maka dari itu, penting untuk melihat secara holistik mengenai iklim industri pariwisata Bali serta dampaknya terhadap masyarakat.

Titik tonggak pengembangan industri pariwisata ialah ketika proses industri dilakukan secara masif oleh pemerintah pada tahun 1980-an. UU Kepariwisataan No. 9 Tahun 1990 menjadi wujud bagaimana penerapan logika industri dilakukan dalam beberapa aspek dan Bali menjadi salah satu daerah yang menjadikan pariwisata sebagai basis pengembangan perekonomian. Meskipun produksi sosio kultural Bali sebagai daya tarik yang kian eksotis telah digaungkan sejak tahun 70-an, namun ketika terjadi pelembagaan melalui regulasi tersebut, arus pariwisata kian massif dan terjadi beberapa perubahan sosio kultural karenanya (Raharjo, Munandar, & Zuhdi, 1998). Dampak tersebut dapat dilihat baik secara kasat masa atas kondisi Bali hari ini hingga kajian empiris para ahli. Permasalahan desakralisasi tradisi menjadi komoditas, perampasan lahan masyarakat tani, privatisasi ruang publik, eksploitasi hingga memarjinalkan masyarakat. Kompleksitas dampak pengembangan industri pariwisata sesungguhnya berakar pada penerapan komodifikasi sebagai wujud atas prinsip neoliberalisme dengan spirit akumulasi kapital.

Neoliberalisme sebagai sebuah sistem ataupun paradigma merupakan pembaharuan atas paham liberalisme yang merupakan anak dari kapitalisme. Fatalnya, ketika mereka mengaplikasikan spirit utama untuk melakukan akumulasi kapital dan menjadikan apapun sebagai alat produksii termasuk diri mereka sendiri maka akan terjadi eksploitasi. Hal ini dikarenakan pemahaman agar terhindar dari lindasan perkembangan globalisasi, maka mereka harus bersaing dan mempertahankan diri ditengah persaingan tersebut (Wibowo & Wahono, 2003). Maka ketika memahami industri pariwisata sebagai sebuah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata sebagai sebuah upaya negara bersaing ditengah dentuman globalisasi, maka prinsip-prinsip selanjutnya yang berkaitan dengan pariwisata akan memiliki paradigma serupa. Salah satunya ialah pentingnya membangun akomodasi penunjang pariwisata sebagai salah satu unsur vital dalam pengembangan pariwisata. Dalam ranah inilah terjadi berbagai bentuk eksploitasi dari sekelompok aktor atau oligarki atas sumber daya alam dan manusia.

Berbagai kasus privatisasi ruang publik oleh beberapa hotel, vila dan resort nampak telah menjadi pemandangan umum. Secara konkret privatisasi pantai dan hanya dapat diakses apabila mengunjungi resort terjadi pada resort Ayana dan Karma Kandara. Hal ini juga

tidak jarang diawali dengan perampasan lahan terhadap masyarakat lokal dengan dalih akan mempekerjakan pemuda setempat di sektor pariwisata. Meskipun begitu jika ditelaah secara kritis, fenomena semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat disamping telah kehilangan hak kepemilikan atas lahan juga bekerja dibawah standar dan tuntutan perusahaan dengan posisi tawar rendah. Sekalipun terdapat beberapa masyarakat yang memperoleh pekerjaan, hal tersebut justru menimbulkan risiko baru yaitu posisi tawar rendah dengan posisi tawar relatif rendah, seperti *office boy*, tukang kebun ataupun satpam. Ironinya, dalam studi Munandar dan (Raharjo, 1998) disebutkan bahwa akibat ikatan tradisi yang masih kuat ditengah masyarakat Bali dan tingginya intensitas ritual tradisi, industri pariwisata justru mempertimbangkan kembali dalam mempekerjakan masyarakat Bali sebab seringkali meminta ijin libur.

Proses marjinalisasi semakin kental terasa ketika disisi lain justru para kapitalis mengkomodifikasi berbagai ritus keagamaan hingga kesenian sakral demi kepentingan akumulasi profit. Proses desakralisasi semacam ini seringkali disuguhkan untuk kepentingan turisme, seperti Tari Kecak dan Tari Pendet. Fakta menarik lainnya, ketika wacana eksotisme dan keteguhan masyarakat Bali atas nilai tradisionalnya dikomodifikasi sebagai daya tarik wisata. Singkatnya, masyarakat Hindu-Bali terus mengalami himpitan industri pariwisata namun disisi lain aktivitas budaya mereka dimanfaatkan demi maksimalisasi akumulasi kapital yang terus

menerus. Kondisi ini juga menjadi salah satu bentuk hegemoni oleh para oligarki dengan produksi dan reproduksi romantisasi atas betapa kuatnya masyarakat Bali ditengah gempuran global namun tetap mampu "*ajeg bali*" (Antara, 2011).

Kompleksitas implikasi eksistensi industri pariwisata Bali dengan spirit neoliberalisme secara kritis dapat dipahami sewaktu-waktu akan semakin memarjinalkan masyarakat setempat. Hal ini semakin kuat ketika penerbitan program pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011. Regulasi ini menekankan dalam upaya mencapai pendapatan perkapita sejumlah US\$ 16.000 ditahun 2025, maka percepatan pembangunan harus dilakukan. Investor dan pemodal memiliki peran penting mengingat limitasi dana pemerintah untuk melakukan pembangunan tidak memadai. Sehingga program ini menekankan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta guna mengejar target yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, prinsip neoliberalisme terkait deregulasi dan liberalisasi semakin kental terasa ketika pada realitanya seringkali dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi luput bahwa produksi risiko sosial terus dilakukan. Hal ini terlihat dari minimnya intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi yang dianggap menghalangi upaya pemodal dalam akumulasi profit seperti penetapan jumlah pekerja, tunjangan sosial, gaji dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, pemerintah merekognisi kondisi ini sekaligus menjadi aktor di dalamnya

melalui regulasi-regulasi bias kepentingan.

Kompleksitas permasalahan industri pariwisata akhirnya menggiring masyarakat pada berbagai risiko yang diproduksi dan direproduksi oleh para oligarki. Masyarakat semakin termarginalkan dari segala sisi sehingga memaksa mereka untuk beradaptasi dengan iklim pariwisata. Misalnya, bagaimana fenomena sekolah berbasis pariwisata semakin menjamur dan diminati guna memudahkan mendapat pekerjaan. Artinya, telah terjadi pergeseran orientasi pendidikan, dimana pendidikan ditekuni guna memenuhi kebutuhan pasar. Dalam konteks Beck, inilah yang disebut penciptaan risiko akibat penerapan industri sehingga distribusi risikopun nampak lebih menumpuk pada masyarakat kelas bawah (Beck, 2012). Ironinya, tidak sedikit masyarakat Bali yang tidak mampu beradaptasi dengan iklim serupa bahkan tidak bisa menyekolahkan anaknya. Hal ini dikarenakan pergeseran orientasi mata pencaharian tidak mampu dilakukan akibat minimnya modal baik pengetahuan maupun skill, sehingga bagi masyarakat tradisional Bali yang mayoritas petani perkembangan industri pariwisata justru mendesak mereka di tanah mereka sendiri.

Dalam penerapannya, reklamasi Teluk Benoa merupakan salah satu proyek guna menyukseskan program MP3EI (Suryani, 2017). Hal ini juga terlihat dalam pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta yaitu PT TWBI. Artinya ketika proyek ini berjalan maka otoritas investor akan lebih besar sedangkan hak masyarakat akan sangat minim mengingat kepemilikan

atas lahan bukan milik masyarakat. Sejalan dengan itu, peluang mengembangkan pariwisata serupa akan lebih besar sehingga proses marjinalisasi menjadi semakin besar. Bahkan publik serta merta harus menanggung risiko bencana alam jika Teluk Benoa kehilangan status konservasinya. Bertolak dari kompleksitas implikasi industri pariwisata terhadap masyarakat, hal inilah yang semakin menguatkan masyarakat untuk melakukan perlawanan menolak reklamasi Teluk Benoa. Hal ini dapat saja disebut sebagai perlawanan atas bagaimana oligarki mencoba mempertahankan hegemoni mereka melalui produksi dan reproduksi wacana yang direkognisi melalui kebijakan.

Spirit berpondasi perjuangan melawan bentuk marjinalisasi industri pariwisata khususnya kasus reklamasi Teluk Benoa menjadi relevan dengan teori *counter-hegemony* milik Gramsci. Ketika memahami hegemoni sebagai suatu usaha melanggengkan kekuasaan tanpa henti, maka perjuangan oleh kelas subordinat yang berupaya untuk dihegemoni masih sangat memungkinkan. Pada tataran inilah penolakan aliansi masyarakat ForBALI dapat dikatakan sebagai gerakan *counter-hegemony* atas paradigma neoliberalisme yang mendominasi penerapan industri pariwisata sehingga menimbulkan risiko bagi masyarakat. Dengan kata lain jika meminjam konsep Elias, ForBALI memperjuangkan masyarakat yang *dettached* atau tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Ritzer & Douglas, 2007). Tentu saja berbagai bentuk upaya menggagalkan reklamasi merupakan

refleksi atas nalar kritis masyarakat yang terorganisir secara praktik. Upaya persuasif melalui penciptaan ruang negosiasi yang pernah dilakukan justru menemukan jalan buntu. Hingga akhirnya mobilisasi massa melalui aksi demonstrasi dipilih ketika berbagai upaya persuasif tidak mampu mengkomodasi aspirasi masyarakat. Misalnya saja aksi mengunci gedung DPRD akibat sikap anggota dewan yang tidak konsisten dalam menyikapi tuntutan masyarakat sekaligus menumpuk poster ketua DPR dengan poster sangat sebagai wujud atas tunduknya perwakilan rakyat dengan kebijakan pro investor ([ForBALI, 2019](#)).

Pasang surut perjuangan ForBALI nampak memiliki peluang ketika Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali mengirim surat penolakan serta memberhentikan proyek reklamasi. Dalam perjalanannya, masyarakat justru nampak kecewa karena terdapat indikasi proyek pembangunan tetap dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, kini marak berkembang kontra wacana atas gerakan ForBALI yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Bali yang mendukung reklamasi. Usungan wacana tersebut menyerukan urgensi reklamasi Teluk Benoa karena mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja masyarakat Bali. Pertanyaan penting dalam wacana ini ialah bagaimana wacana ini di produksi dan apa kepentingan yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif aliansi ForBALI gerakan tandingan ForBALI merupakan upaya dari para oligarki untuk memecah pandangan masyarakat dalam memandang reklamasi. Apabila hal tersebut

benar terjadi, maka kontekstualisasi atas teori hegemoni Gramsci menjadi semakin relevan. Relevansi terletak pada ranah bagaimana produksi wacana yang bersifat ideologis pro reklamasi digaungkan melalui mobilisasi massa. Maka dari itu, konsep hegemoni dan counter hegemony merupakan proses dialektis yang selalu hadir dalam upaya mempertahankan bahkan merebut sebuah kekuasaan, salah satunya melalui produksi wacana.

IV. SIMPULAN

Gerakan sosial masyarakat ForBALI dari tahun 2012 hingga hari ini merupakan bentuk konkret bagaimana masyarakat melakukan resistensi terhadap pembangunan. Pembangunan pada tataran ini ialah proses pengembangan industri pariwisata. Melalui berbagai upaya, gerakan sosial ForBALI hadir untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang merasa rencana pembangunan reklamasi Teluk Benoa adalah bentuk dari upaya eksploitasi tanah Bali. Upaya eksploitasi direfleksikan dari langkah realisasi reklamasi dari pemerintah cenderung secara diam-diam serta tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Di lain sisi, ketika dikatakan reklamasi demi kepentingan masyarakat, nyatanya terdapat informasi bahwa lahan reklamasi telah terjual kepada para pemodal bahkan sebelum reklamasi berlangsung. Bahkan terdapat indikasi rekayasa ijin AMDAL. Upaya mediasi bagi masyarakat akhirnya percuma sebab disetiap kesempatan mediasi, pemerintah selalu menjadi oposisi

dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari posisi pemerintah, aparat bersenjata serta pemodal duduk bersama berseberangan dengan masyarakat. Maka dari itu, turun ke jalan dan memanfaatkan berbagai media ditempuh oleh ForBALI untuk menyebarkan visi dan misi mereka seperti menggagalkan reklamasi dan mengumpulkan simpati massa.

Paska ForBALI menyuarakan penolakan reklamasi, muncul aliansi masyarakat pro reklamasi (ForsBALI). Aliansi masyarakat ForsBALI membawa agenda berseberangan dengan ForBALI karena menuntut untuk menyegerakan reklamasi. Reklamasi dianggap akan menjadi jalan keluar bagi masalah pengangguran masyarakat Bali. Pada tataran ini, perjuangan kedua belah pihak menunjukkan sebuah perjuangan untuk memenangkan kuasa atas arah pembangunan.

Eksistensi ForsBALI nampak tidak meluruhkan spirit emansipatoris ForBALI dari upaya hegemoni pemerintah. Pada tataran inilah penolakan aliansi masyarakat ForBALI dapat dikatakan sebagai gerakan *counter-hegemony* atas paradigma neoliberalisme yang mendominasi penerapan industri pariwisata sehingga menimbulkan risiko bagi masyarakat. Bayangan risiko dikemudian hari apabila reklamasi dilangsungkan ialah bentuk kekecewaan atas risiko yang diterima oleh masyarakat pada industri pariwisata yang telah berkembang saat ini. Sebut saja kemacetan, konversi lahan, banjir, munculnya masyarakat marjinal dan

sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, V. T. (2017). *Gerakan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Nusa Dua Bali*. Universitas Airlangga.
- Antara, I. W. (2011). *Ajeg Bali: Mitos atau Ideologi Pembangunan Mengabdikan Pada Sang Penindas*. Singhadwala.
- Beck, U. (2012). *Risk Society; Towards A New Modernity*. London: Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- ForBALI. (2013). *Mengapa Kami Menolak*. Retrieved from ForBali.org: <https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/>
- ForBALI. (2019). *Spektakuler! ForBALI Tumpuk Baligho DPRD Dengan Gambar Sambut*. diakses pada tanggal 26 September 2019. <https://www.forbali.org/id/spektakuler-forbali-tumpuk-baliho-dprd-dengan-gambar-sambut/>.
- Galuh, A. K. (2016, Juni). Media Sosial Sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 73-92. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.602>
- Hadirman, F. (2017). *Dalam Moncong Oligarki*. Yogyakarta: Kanisius .
- Manalu, D. (2007). Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik. *Populasi*, 18, 27-50. <https://doi.org/10.22146/jp.12066>
- Pasaribu, R. (2012). *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*. Depok: Universitas Gundarma.
- Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA**
- Peraturan Menteri 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan Terkait Izin**

**Lokasi Penyelenggaraan Reklamasi Untuk
PT. TWBI**

Peraturan Presiden No 32 Tahun 2011 Tentang
Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pramestisari, N. A. (2019). *Desa Dalam Pusaran
Industri Pariwisata*. Yogyakarta: SKRIPSI.

Priadarsini, Dewi, R., & Parameswari, I. (2018,
Oktober). Gerakan Tolak Proyek Reklamasi
Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas
Kultural. *Jurnal Kajian Bali*, 8(2), 159-176.
<https://doi.org/10.24843/JKB.2018.v08.i02.p10>

Raharjo, S., Munandar, A., & Zuhdi, S. (1998). *Sejarah
Kebudayaan Bali*. Jakarta: CV Eka Darma.

Ritzer, G., & Douglas, J. (2007). *Teori Sosiologi
Modern*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Salamini, L. (1981). *The Sociology of Political Praxis
an Introduction to Gramsci's Theory*. London:
Routledge & Kegan Paul.

Sukiswanti, P. (2014). *Sejumlah Ormas Bali Dukung
Revitalisasi Teluk Benoa*. Bali dan Nusa Tenggara:
Indonews.com. Retrieved from [https://
daerah.sindonews.com/berita/878384/27/
sejumlah-ormas-bali-dukung-revitalisasi-teluk-
benoa](https://daerah.sindonews.com/berita/878384/27/sejumlah-ormas-bali-dukung-revitalisasi-teluk-benoa)

Suryani, L. (2017). *Ternyata Ada Rencana Bisnis
Wisata Tol di Atas Teluk Benoa*. Mangabay:
Diakses pada 27 September 2019. [http://
www.mongabay.co.id/2017/02/02/ternyata-ada-
rencana-bisnis-wisatadol-di-atas-teluk-benoa/](http://www.mongabay.co.id/2017/02/02/ternyata-ada-rencana-bisnis-wisatadol-di-atas-teluk-benoa/).

UU Kepariwisata No. 9 Tahun 1990

Wardana, A. (2017). Neoliberalisasi Kawasan
Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis
atas Praksis Perlawanan di Bali. *Wacana Jurnal
Transformasi Sosial*, 55-90.

Wibowo, I., & Wahono, F. (2003). *Neoliberalisme*.
Yogyakarta: CPRC.